

PEMBANGUNAN KARAKTER DAN NILAI-NILAI KOMUNITAS BASIS

Oleh: Kristanto Budiprabowo, M.Th.

PENDAHULUAN

Tiap komunitas basis secara natural dan kultural selalu berada dalam proses menjalani, memperbaiki, dan menemukan kembali karakternya dengan cara yang baru. Hal itu terjadi dalam negosiasi yang terus-menerus dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar komunitas itu. Dinamika perubahan yang berpengaruh dan dalam proses transformatifnya membentuk secara unik karakter sebuah komunitas itu, kadang berjalan dengan keras penuh konflik yang bisa berujung pada perpecahan, namun tak jarang juga berjalan dengan damai penuh kearifan dan bahkan memperkokoh kohesi sosial yang dimilikinya.

Salah satu dinamika paling memberi pengaruh pada sebuah komunitas basis adalah tersebarnya konsep ideologis dan yang apalagi tersosialisasi sebagai pilihan politis yang ditetapkan oleh penguasa dimana komunitas basis itu berada. Dinamika itu menjadi semakin intens memberi pengaruh jika memanfaatkan juga kekuatan kekuasaan ekonomis yang tak bisa dihindari oleh komunitas basis secara tegas dan transparan. Hal mana telah menjadi persoalan klasik antara konsep peniadaan komunitas basis dibawah dominasi negara bangsa dan realitas bahwa komunitas basis – yang ternyata tidak lagi hanya bisa dilihat berdasar etnoreligius – mampu terbentuk dalam kesadaran dan sentimen kohesi sosial yang baru.ⁱ

Saya berasumsi bahwa salah satu unsur kekuatan – katakanlah misalnya - Pancasila sebagai rumusan dasar nilai-nilai yang diterima bersama adalah karena dia terbangun dari kesadaran kolektif karakter komunitas-komunitas basis yang (dipaksa oleh modernitas) membutuhkan ikatan ideologis bersama dalam membentuk komunitas yang lebih besar, sebesar sebuah bangsa sekalipun. Sekalipun nilai-nilai utama pembentuk karakter sebuah komunitas yang menjadi ke-khas-an sebuah komunitas tentu tidak tergantikan dengan adanya hal itu, namun sebagai sebuah kesadaran bersama, ia berada pada tempat yang sangat istimewa yang mau tidak mau memberi pengaruh penting bagi komunitas basis dan karakter yang terbangun di atasnya. Tulisan ini akan mencoba memperlihatkan bahwa perubahan paradigma terhadap makna komunitas itu diperlukan. Karena pada dasarnya sebuah komunitas selalu memiliki ruang transformasiⁱⁱ nilai yang akhirnya menyebarkan karakter yang khas dan kuat bagi komunitas yang lebih besar – sebesar sebuah bangsa sekalipun.

KOMUNITAS BASIS DAN SISTEM NILAI

Karakter sebuah komunitas basis – entah itu yang berpondasi pada etnisitas tertentu, religiusitas tertentu, atau kesadaran pada tujuan bersama tertentu – awalnya terbangun dari kerumitan sistem nilai yang dimiliki tiap-tiap

anggotanya, yang secara dinamis saling-silang bertransformasi di dalam komunitas, namun yang juga secara selektif berinteraksi dengan sistem nilai yang berasal dari luar komunitas tersebut. Karakter khas seperti ini kadang mudah nampak kelihatan di permukaan, namun simbol-simbol dan pemaknaannya terkait erat dengan nilai-nilai yang mengarusutama di dalam komunitas. Apa yang nampak bisa dideskripsikan, yang tidak nampak perlu diinterpretasikan, selanjutnya tetaplah berada pada kesadaran para anggota komunitas basis itu. Baik komunitas yang berbasis etnoreligius maupun komunitas yang berbasis pada tujuan-tujuan yang lebih pragmatis, pada akhirnya akan memperlihatkan kekuatannya dalam menentukan terhadap nilai-nilai bersama yang hendak dipilihnya dan dijadikan acuan untuk menentukan identitasnyaⁱⁱⁱ. Dalam komunitas basislah terjadi perjumpaan dan penemuan terhadap nilai-nilai komunitas dan dalam perjumpaan itulah terbangun karakter komunitas.

Tiap orang memiliki nilai utama dalam dirinya yang sadar atau tidak menggerakkannya pada pilihan untuk tertuju pada apa yang paling dianggapnya tepat bagi hidupnya. Bisa dikatakan bahwa nilai-nilai adalah, segala sesuatu yang dipikir, dirasa, dan dilakukan, yang secara personal hal itu dianggap penting, berharga, bermakna, dan membahagiakan. Maka nilai utama adalah nilai diri yang paling menonjol dalam mengarahkan seseorang pada cara hidupnya. Nilai utama personal inilah yang akan selaluberjumpa dan berinteraksi dengan nilai utama yang dimiliki orang lain. Begitu seterusnya, hingga negosiasi nilai-nilai utama personal itu membentuk sebuah sistem nilai bersama dalam komunitas, menghasilkan karakter-karakter unik orang-orangnya, pun karakter komunitas tersebut.

Sebagai sebuah contoh, sistem nilai yang paling menonjol dalam banyak komunitas basis adalah gotong-royong. Melakukan pekerjaan secara bersama-sama dengan sukarela dan sukacita dengan tujuan utama tidak melulu menyelesaikan pekerjaan namun juga menikmati kebersamaan. Gotong royong adalah sistem nilai bersama dimana nilai-nilai personal seperti kebersamaan, kesukarelaan, sukacita, kerja, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu terakumulasi, bernegosiasi, dan terbentuk dalam transformasi yang unik. Jelas dalam situasi gotong-royong ada orang yang melihat nilai terpentingnya adalah jika pekerjaan bersama itu terselesaikan (nilai kerja dan hasil), namun tentu ada juga orang yang lebih menghargai kehadiran semua orang lebih besar daripada sekedar menyelesaikan pekerjaan (nilai kebersamaan). Begitulah kerumitan sistem nilai bekerja dalam sebuah komunitas dengan cara yang sangat khas. Mungkin ada kontestasi nilai, menganggap satu nilai utama lebih penting dari yang lain, namun karena nilai-nilai utama yang bersifat personal itu telah berada dalam frame sistem nilai bersama, maka gotong-royong dijalani sebagai sumber pengalaman bersama, tempat nilai utama personal berkorelasi dengan nilai utama orang lain. Gotong-royong dengan begitu tidak pernah bisa dilakukan personal, dia adalah tindakan, pemikiran dan pilihan komunal.

Saya membayangkan hampir yakin, beginilah dulu ketika Sukarno sering menyatakan bahwa gotongroyong adalah inti dari Pancasila^{iv} yang adalah karakter mendasar bagi rakyat yang merdeka. Dia memposisikan tiap ayat pancasila sebagai kumpulan sistim nilai yang nampak menonjol sudah ada dalam komunitas-komunitas basis di Indonesia, dan juga dalam perjumpaannya dengan sistem nilai yang sedang dibangun bersamaan dengan semangat tatanan dunia baru yang terjadi secara internasional. Gelora sistem nilai yang menguat seperti itulah yang sebenarnya menjadi dasar terjadinya perubahan sosial baik yang terjadi secara evolusioner maupun secara revolusioner. Sistem nilai personal dipertaruhkan dalam semangat bersama, demi mencapai sebuah tujuan bersama yang lebih utama dan dianggap memiliki keagungan melebihi nilai komunitas. Namun zaman bergulir, mau tidak mau, semangat membara yang berangkat dari sistem nilai komunitas itu, mengharuskannya berbentuk formal terorganisir dan terlembagakan demi efektifitas dan percepatan perubahan sosial yang dikehendaki bersama. Inilah godaan terbesarnya.

Maka pada saat sebuah sistem nilai masuk dalam gelora sistem politik tertentu, sebagaimana seringkali nampak dalam semangat agama-agama tertentu berusaha melakukan pengkaplingan sebagai yang paling absah menawarkan sistem nilainya agar dijadikan arusutama dalam penyelenggaraan negara, saat itulah sebuah sistem nilai menemui tantangan terbesarnya. Bagi saya, inilah tantangan terbesar yang selama ini menjadi benang kusut bagi terbangunnya secara komprehensif karakter berbangsa. Sistem nilai itu tersedia, namun menjadi tidak beroperasi sepenuhnya di tengah-tengah masyarakat, terutama karena mudah menjadi alat politik bagi kekuasaan. Jadi tantangan yang berkaitan dengan upaya mengidentifikasi dan selanjutnya membangun karakter bagi sebuah komunitas sebesar sebuah bangsa terletak pada perubahan paradigma tentang apa dan bagaimananya sebuah komunitas dengan keseluruhan nilai-nilai utamanya mampu bertransformasi dalam perubahan jamannya.

KARAKTER BANGSA DAN PERANGKAP IDIOLOGISASI

Kita semua tahu bahwa karakter bukan bawaan lahir. Dia dibangun dalam kesadaran diri dengan proses seleksi yang panjang selama perjalanan hidup dan dijalani dengan kesungguhan dan bertanggungjawab atasnya. Sebagai seorang warganegara dalam sebuah negara yang sedang mencari bentuk paling ideal mempraktekkan segala kekayaan sistem nilai yang dimilikinya, kita menemukan tantangan terbesar arus demokratisasi tidak hanya pada isu-isu yang secara teritorial dan konseptual membutuhkan negosiasi praktis. Kita diperhadapkan juga pada realitas dimana ide-ide besar tentang bangsa dan negara itu sendiri dipertanyakan fungsi pentingnya dalam menguatkan sistem nilai komunal yang berkembang. Ideologi tak bisa hanya dipahami dari konsepsi tentang kewarganegaraan lagi. Ideologi kadang bisa menjadi perangkat bagi sistem nilai. Sebagaimana telah lama pernah diingatkan oleh Anderson bahwa kesalahan fatal

memahami bangsa yang terbangun dari pondasi sistem nilai komunal seperti kebebasan dengan gerakan idiologisasi dalam konsep negara yang cenderung bicara soal kekuasaan dan teritori.^v

Sebagai orang yang mengaku diri Indonesia dan menerima konsensus berasa mengarusutamakan Pancasila sebagai sistem nilai dalam berpikir dan berperilaku kebangsaan, idiologisasi atasnya, yang menempatkannya sebagai mekanisme untuk mendapatkan keuntungan atau menerima hukuman dalam kerangka pikir negara-bangsa, justru akan semakin kontra produktif dengan proses alamiahnya. Yang saya maksudkan adalah, sebuah sistem nilai dalam kehidupan berbangsa itu memang perlu dikelola. Dia penting tidak hanya sebagai identitas, namun juga sebagai penggerak utama perubahan sosial yang dikehendaki bersama. Jadi, ketika perubahan sosial yang dihendaki bersama – katakanlah – telah ditetapkan secara idiologis dalam arah bernegara, maka sistem nilai itu tidak begitu saja bisa digunakan sebagai satu-satu alat untuk mencapainya.^{vi} Dengan kata lain, sebuah bangsa bisa terbangun dari akumulasi sistem nilai bersama yang menguat dan menghasilkan karakter tertentu dan selanjutnya menjadi bangunan identitas tertentu, namun sebuah sistem politik bernegara – seideal apapun itu – tidak pernah bisa menghasilkan sebuah sistem nilai yang dengan mudah dapat segera diinternalisasi menjadi nilai komunitas seluas bangsa apalagi menjadi nilai personal.

Pancasila adalah sistem nilai sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Progresifitasnya terletak pada legitimasinya untuk mempertanyakan sistem nilai komunitas di bawahnya dan sekaligus sistem nilai personal warganegarannya. Namun transformasi seperti itu hanya akan nampak produktif jika tidak dijadikan alat politik kekuasaan negara namun tetap sebagai gerakan budaya yang terus menguji ketahanan komunitas yang ada di dalamnya.

PEMBENTUKAN KARAKTER BERBASIS NILAI

Sekalipun nampak aneh, tapi nyata, semakin dunia ini masuk dalam era global ternyata semakin pula ekspresi-ekspresi sosio politik lokal yang nyaring menggema. Hal ini menurut Yudi Latif memberi pengaruh besar bagi usaha tiap komunitas untuk membangun kesadaran identitas bersamanya dalam pigura kesadaran negara-bangsa.^{vii} Dalam kaitannya dengan nilai-nilai utama komunitas nampaklah bahwa apa yang dia sebut sebagai *epistemic community* yang semakin hari semakin menggejala dan tak bisa lagi dikontrol oleh kerangka negara-bangsa itu perlu dipetakan dengan sangat berhati-hati. Sebagai sebuah contoh, yang seringkali nampak dalam gerakan mahasiswa saat ini adalah model berpikir mengarusutamakan ideologi tertentu. Analisis kelas berdasar pemikiran Karl Marx misalnya, rajin dipelajari dan dijadikan slogan bagi gerakan anti penindasan dan penghisapan terhadap manusia lainnya. Tentu ini sangat penting dan bermanfaat untuk mengembangkan model berfikir kritis. Namun jika dilihat lebih jauh mengapa pilihannya jatuh pada konsepsi ideologi sosialis ketika masuk dalam

diskusi tentang bentuk negara, bisa jadi jawaban pragmatis untuk tujuan perjuangan pada hasillah yang menjadi dominan. Bahwa di dalam konsepsi idiologis itu tertanam nilai-nilai kesetaraan, keadilan dan kemanusiaan, hal itu tidaklah menjadi perhatian utama. Komunitas menentukan sendiri bagaimana caranya berpikir dan menggunakan pilihan cara berpikirnya itu untuk tujuan bersama yang dianggapnya lebih luhur.

Dalam salah satu tesisnya mengenai etika politik dan perubahan sosial, Peter L. Berger pernah dengan sangat jeli melihat bahwa kecenderungan seperti yang nampak dalam menguatnya kesadaran komunitas basis adalah karena pada dasarnya setiap orang memang menghendaki dan perlu dijamin haknya untuk hidup secara bermakna^{viii}. Nilai-nilai utama komunitas adalah bentuk paling nyata dari usaha yang beragam untuk mendefinisikan realitas. Dan dengan adanya hak untuk mendefinisikan realitas itulah tiap komunitas menemukan nilai keutamaannya.

Jadi dengan melihat bahwa era sekarang adalah era dimana komunitaslah yang semakin nampak memiliki keleluasaan tidak hanya menentukan caranya berpikir melainkan juga menemukan makna bagi komunitasnya, maka membicarakan pembangunan karakter tidak lain adalah membicarakan pentingnya merevitalisasi nilai-nilai bersama dalam komunitas itu sekaligus mekanisme akuntabilitasnya dalam rasionalitas hidup bernegara^{ix}. Apakah dalam hal seperti ini negara masih diperlukan, setidaknya akan teruji pada kemampuannya menjaga agar nilai-nilai bersama dalam komunitas itu bertransformasi secara produktif bagi terbangunnya karakter bangsa. Hal inilah yang seringkali nampak dalam diskusi mengenai kehadiran (dan ketidakhadiran) negara dalam persoalan-persoalan bangsa yang sesungguhnya adalah perjumpaan nilai-nilai antar komunitas yang tak terkelola dengan baik.

Dalam kehidupan bernegara, nilai-nilai bersama dalam komunitas itu perlu diartikulasikan dalam idiom yang dengan mudah bisa dimengerti oleh seluruh warganegara. Sehingga selain makin memiliki nilai akuntabilitas, nilai-nilai bersama itu dapat diposisikan sebagai kerangka berpikir atau sebuah metode intelektualitas bagi keseluruhan warga negara untuk menamai dan memaknai realitasnya. Beberapa langkah yang bisa saya usulkan agar pembngnan karakter bangsa itu bisa menjadi pertimbangan bagi sistem bernegara yang tentu terus akan berusaha menemukan cara-cara terbaiknya diantaranya adalah:

1. Melakukan assesment dan mapping secara kontinyu terhadap nilai-nilai utama komunitas basis, bersama-sama dengan keseluruhan pihak dalam komunitas itu menentukan indikator-indikatornya dan sekaligus menamainya dengan artikulasi yang dapat dipahami oleh seluruh warga negara. Dengan cara inilah demokratisasi dapat menjadi proyek penyadaran dan juga pendidikan karakter yang mengena tidak hanya pada kesadaran terhadap sistem kekuasaan, namun sekaligus juga terhadap budaya yang sedang berkembang.

2. Pendidikan karakter memerlukan pendekatan yang holistik dan integralistik meliputi keseluruhan bidang keilmuan yang ada, terutama dengan makin massifnya penggunaan teknologi cyber. Salah satu hal yang dapat menentukan pendidikan karakter itu terinternalisasi dalam diri seseorang adalah ketika terjadi apresiasi yang tulus terhadap keragaman nilai personal yang dimiliki seseorang. Dengan mengarusutamakan nilai-nilai, termasuk juga dengan membiasakan kesadaran adanya perjumpaan dengan nilai yang berbeda secara transparan dan dialogis dalam pembangunan karakter merupakan salah satu jalan masuk bagi kesadaran diri seseorang pada kesadaran seluas komunitas bangsa.
3. Nilai-nilai komunitas selalu perlu untuk diuji berdasarkan indikator yang dibuat sendiri oleh komunitas itu sendiri. Dengan cara ini pendidikan karakter menawarkan metode akuntabilitas baik pikiran, perkataan, dan perbuatan sekaligus, membiasakan komunikasi dan relasi yang dialogis, sekaligus mempersempit ruang-ruang segregasi yang biasanya muncul dari sistem dominasi dan sentralisme.

Pembangunan karakter dalam sebuah frame kehidupan sebagai sebuah komunitas bangsa pada dasarnya memiliki pondasi kuat dalam nilai-nilai bersama komunitas. Jika tuntutan modernisme masih menghendaki agar ada sebuah lembaga yang memiliki otoritas agar sistem nilai kebangsaan itu terpelihara dalam dinamika yang berlangsung damai dan berkeadilan, maka nampaknya ide tentang negara setidaknya perlu dimulai dari dalam nilai-nilai yang berada dalam komunitas itu sendiri. Dan kini, sejarah membuktikan bahwa semakin terjadi sinkronisasi antara konsepsi negara dengan nilai-nilai komunitas, maka akan semakin memperlihatkan seberapa tegas sebuah karakter bangsa itu, dan sekaligus menguji seberapa kuat atau lemahnya sebuah negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Robert W. Hefner (ed.), *Politik Multikulturalisme; Menggugat Realitas Kebangsaan*, Kanisius-impulse, Yogyakarta, 2007.
- Peter Block, *Community; The Structure of Belonging*, Berrett-Koehler Publishing, San Francisco, 2008.
- Santiago Zabala (ed.), *Richard Rorty and Gianni Vattimo; The Future of Religion*, Columbia University Press, New York, 2005.
- Herbert Feith & Lance Castles, *Indonesian Political Thinking 1945-1965*, Cornell University Press, Ithaca-London, 1970.
- Benedict Anderson, *Nasionalisme Indonesia Kini dan Masa Depan*, presentasi kuliah umum di Jakarta 4 Maret 1999.
- Niels Mulder, *Ruang Batin Masyarakat Indonesia*, LkiS, Yogyakarta, 2001.
- Yudi Latif, *Glokalisasi dan Kebangkitan Politik Identitas*, dalam Widya P. Setyanto (ed.), *Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik di Indonesia dan Asia Tenggara*, Percik, Salatiga, 2009.

Peter L. Berger, *Piramida Kurban Manusia, Etika Politik dan Perubahan Sosial*, LP3ES, Yogyakarta, 2005.

Simon Philpott, *Meruntuhkan Indonesia, Politik Postkolonialisme dan Otoritarianisme*, LkiS, Yogyakarta, 2000.

Catatan Kaki

ⁱ Robert W. Hefner (ed.), *Politik Multikulturalisme; Menggugat Realitas Kebangsaan*, Kanisius-impulse, Yogyakarta, 2007. Dalam pendahuluan editorialnya Hefner melihat problematika klasik teoritik antara perlunya “pemangkasan solidaritas ethnoreligius” dalam bangunan sebuah karakter bangsa yang mampu menjamin demokrasi dan perdamaian sipil sebagaimana konsepsi Huntington, dengan pendekatan yang dilakukan Juergensemeyer yang melihat bahwa mobilitas manusia yang telah melintasi batas-batas bangsa justru sebaliknya; terjadinya kemunculan lagi sentimen ethnoreligius.

ⁱⁱ Peter Block, *Community; The Structure of Belonging*, Berrett-Koehler Publishing, San Francisco, 2008.

ⁱⁱⁱ Santiago Zabala (ed.), *Richard Rorty and Gianni Vattimo; The Future of Religion*, Columbia University Press, New York, 2005.

^{iv} Herbert Feith & Lance Castles, *Indonesian Political Thinking 1945-1965*, Cornell University Press, Ithaca-London, 1970.

^v Benedict Anderson, *Nasionalisme Indonesia Kini dan Masa Depan*, presentasi kuliah umum di Jakarta 4 Maret 1999.

^{vi} Niels Mulder, *Ruang Batin Masyarakat Indonesia*, LkiS, Yogyakarta, 2001. Telah melihat gejala kegagalan negara dalam mengontrol sistem nilai dalam diri masyarakat Indonesia. Semakin negara menguat, maka polarisasi terhadap kesadaran pada nilai-nilai komunitas juga mampu menjadi gerakan penyeimbang yang bisa membahayakan atau memberi harapan.

^{vii} Yudi Latif, *Glokalisasi dan Kebangkitan Politik Identitas*, dalam Widya P. Setyanto (ed.), *Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik di Indonesia dan Asia Tenggara*, Percik, Salatiga, 2009.

^{viii} Peter L. Berger, *Piramida Kurban Manusia, Etika Politik dan Perubahan Sosial*, LP3ES, Yogyakarta, 2005.

^{ix} Simon Philpott, *Meruntuhkan Indonesia, Politik Postkolonialisme dan Otoritarianisme*, LkiS, Yogyakarta, 2000. Dia mengusulkan sebuah alternatif bagi rasionalitas politis yang memposisikan peran penting negara yaitu rasionalitas politik yang memiliki bentuk moral, rasionalitas politik yang memiliki karakter epistemologis, dan rasionalitas politik yang diartikulasikan dalam idiom tertentu.